



Strategy Penguatan Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas di Kesepuhan Sinarresmi dalam Mendukung Pertahanan Negara

Strategy for Strengthening Community-Based Food Resilience in Kesepuhan Sinarresmi to Support National Defense

Wenni Mustika ^{1*}, Hikmat Zakky Almubaraq ², Untung Hartono ³

¹⁻³ Universitas Pertahanan Indonesia, Indonesia

*Penulis korespondensi : mustikawenni13@gmail.com

Article History:

Naskah Masuk: 30 September 2025;

Revisi: 25 Oktober 2025;

Diterima: 14 November 2025;

Tersedia: 17 November 2025;

Keywords: Community, Elderly, Food Diversification, Food Security, Framework, Non Military Defense, Traditional, Village.

Abstract: Kesepuhan Sinarresmi has long been recognized for implementing a community-based food resilience system rooted in indigenous customary law. This study on Kesepuhan Sinarresmi aims to analyze the strategy for strengthening food resilience using an in-depth Qualitative Case Study approach. Data was collected through interviews, participant observation, and combined with a review of current literature related to food resilience, customary institutions, and non-military defense. The findings reveal that the food resilience strengthening strategy in Kesepuhan Sinarresmi proves effective through the integration of socio-cultural institutions and ecologically aligned agronomic practices. This food resilience system is sustained by: 1) Customary Institutions governing access and distribution; 2) The Leuit Institution (communal granary) serving as an inter-generational strategic reserve; and 3) The diversification of 68 Local Rice Varieties, which enhances resilience against crop failure and climate change. This model affirms the principle of community food sovereignty and functions as a robust logistical system, simultaneously serving as a best practice for non-military national defense. Based on the study conducted in Kesepuhan Sinarresmi, it is recommended that the Indigenous Community food reserve system be formally recognized and integrated into a policy framework. This is proposed as a strategic effort to strengthen national resilience against crises

Abstrak

Kesepuhan Sinarresmi sudah dikenal sejak lama menerapkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada komunitas adat. Kajian mengenai Kesepuhan Sinarresmi ini bertujuan untuk menganalisis strategi dalam penguatan ketahanan pangan dengan metode pendekatan Studi Kasus Kualitatif secara mendalam melalui wawancara yang dikumpulkan, observasi partisipatif serta dipadukan dengan studi literatur terkini terkait ketahanan pangan, kelembagaan adat, dan pertahanan nirmiliter. Hasil kajian menunjukkan bahwa. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi penguatan ketahanan pangan di Kesepuhan Sinarresmi terbukti efektif melalui integrasi institusi sosial-budaya dan praktik agronomis yang selaras ekologi. Sistem ketahanan pangan ini ditopang oleh: 1) Kelembagaan Adat yang mengatur akses dan distribusi; 2) Institusi Leuit (lumbung padi komunal) yang berfungsi sebagai cadangan strategis antargenerasi; dan 3) Diversifikasi 68 Varietas Padi Lokal yang meningkatkan resiliensi terhadap kegagalan panen dan perubahan iklim. Model ini menegaskan prinsip kedaulatan pangan (food sovereignty) komunitas dan bertindak sebagai sistem logistik yang tangguh, sekaligus menjadi praktik baik pertahanan negara nirmiliter. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan di Kesepuhan Sinarresmi, direkomendasikan perlu adanya pengakuan dan pengintegrasian sistem Cadangan pangan Masyarakat adat ke dalam sebuah kebijakan, sebagai Upaya strategis untuk memperkuat ketahanan nasional terhadap krisis.

Kata Kunci: Desa Adat, Diversifikasi Pangan, kelembagaan, komunitas, Kesepuhan, Ketahanan Pangan, Pertahanan Nirmiliter.

1. PENDAHULUAN

Ketahanan Pangan merupakan salah satu strategi dalam mendukung Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) baik secara Internasional, maupun dalam skala Nasional bahkan telah adaptasi menjadi SDGs Desa dengan sasaran langsung kepada Masyarakat desa. FAO (2023) mencatat bahwa pada tahun 2022 sekitar 735 juta orang mengalami kelaparan kronis, sementara World Bank (2022) memperingatkan kenaikan harga pangan dapat mendorong 10 juta orang ke dalam kemiskinan ekstrem. Indonesia sendiri, berdasarkan catatan data Global Food Security Index (GFSI), pada tahun 2021 berada di peringkat ke-69 dari 113 negara, dengan skor 59,2. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan ketahanan pangan lokal yang berbasis komunitas. Meskipun desa memiliki peran penting dalam produksi pangan nasional, belum optimalnya peran komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya pangan menjadi tantangan tersendiri. Lemahnya institusi lokal dan kurangnya adopsi teknologi menjadi hambatan dalam menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Penelitian oleh Sari et al. (2021) menunjukkan pentingnya partisipasi komunitas dalam sistem pangan lokal, namun belum banyak dikaji bagaimana komunitas desa dapat mengintegrasikan pendekatan teknologi dan kelembagaan dalam jangka panjang. Hal ini juga terlihat pada Kesepuhan Sinarresmi ini, terbatasnya kajian terkait strategi penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas di wilayah perdesaan dalam mendukung pertahanan negara, sehingga melatarbelakangi peneliti untuk menjawab pertanyaan bagaimana strategi penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas tersebut diterapkan dengan baik di kesepuhan ini.

Kesepuhan Sinarresmi, yang terletak di kaki Gunung Halimun, Kabupaten Sukabumi, merupakan salah satu komunitas adat yang masih memegang teguh praktik agraris tradisional. Komunitas ini mengelola sistem ketahanan pangan yang unik, ditandai dengan kelembagaan adat yang kuat (dipimpin oleh Pupuhu Adat atau Abah), keberadaan Institusi Leuit (lumbung padi), dan konservasi lebih dari 68 varietas padi lokal. Keunikan ini memberikan landasan yang kuat untuk menguji konsep ketahanan pangan berbasis komunitas yang melampaui sekadar masalah ketersediaan, namun menyentuh aspek akses, pemanfaatan, dan stabilitas secara kolektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana strategi penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas adat di Kesepuhan Sinarresmi diimplementasikan melalui kelembagaan lokal dan diversifikasi pangan, serta sejauh mana relevansinya dalam mendukung dimensi pertahanan negara nirmiliter?

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan strategi penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas di Kasepuhan Sinarresmi.
2. Mengkaji peran institusi adat, sistem leuit, dan praktik diversifikasi pangan lokal dalam menjamin resiliensi pangan komunitas.
3. Menjelaskan kontribusi model ketahanan pangan Kasepuhan Sinarresmi terhadap konsep pertahanan negara nirmiliter, khususnya dalam konteks ketahanan logistik pangan saat krisis.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai ketahanan pangan berbasis komunitas, terutama yang didukung oleh kearifan lokal, memerlukan landasan teoritis yang kuat dan kontekstual. Penelitian ini bertumpu pada tiga pilar utama: konsep ketahanan pangan (food security), tata kelola sumber daya bersama (commons theory), dan kedaulatan pangan (food sovereignty).

Konsep Ketahanan Pangan dan Komunitas

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan yang mencerminkan ketersediaan, kuantitas, kualitas, keamanan, keberagaman, serta keterjangkauan. Secara internasional, FAO (2023) merumuskan empat pilar utama: ketersediaan (availability), akses (access), pemanfaatan (utilization), dan stabilitas (stability).

Pendekatan berbasis komunitas terbukti efektif dalam memperkuat pilar-pilar ini. Dalam konteks lokal, strategi penguatan ketahanan pangan sering melibatkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya kolektif. Misalnya, studi kasus implementasi kebijakan ketahanan pangan yang melibatkan perempuan di sekitar hutan menunjukkan strategi tersebut efektif dalam menghadapi kerentanan pangan di tingkat lokal. Selain itu, peran komunitas dan budaya lokal menjadi sangat mendesak, terutama terlihat dalam gerakan urban farming di masa krisis, yang menunjukkan kemampuan adaptasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pangan harian.

Peran Kelembagaan Lokal dan Diversifikasi Pangan

Kelembagaan lokal memainkan peran krusial dalam mengatur produksi dan distribusi pangan komunitas. Prinsip-prinsip ini dapat dibaca melalui teori Commons (Ostrom, 1990) yang menekankan pentingnya aturan bersama, pengawasan sosial, dan sanksi untuk menjaga sumber daya alam, seperti lahan dan air. Penerapan tata kelola ini terwujud dalam:

1. Pengendalian Sumber Daya: Kelembagaan adat/lokal memastikan sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan, bukan sekadar dieksplorasi untuk kepentingan pasar.
2. Diversifikasi Pangan: Kelembagaan lokal berperan aktif dalam pengembangan diversifikasi pangan, memastikan varietas lokal tidak hilang dan pola konsumsi tetap beragam.

Sementara itu, pendekatan Kedaulatan Pangan (Food Sovereignty) (Nyéléni Forum, 2007) juga relevan, karena menekankan hak komunitas untuk mendefinisikan sistem pangan mereka sendiri, sejalan dengan budaya dan nilai lokal. Diversifikasi pangan yang didasarkan pada nilai-nilai dan kearifan lokal merupakan penyanga penting dalam upaya peningkatan ketahanan pangan nasional.

Resiliensi dan Pertahanan Non-Militer

Kerangka resiliensi (resilience framework) penting untuk memahami kapasitas adaptif komunitas dalam menghadapi gangguan (misalnya perubahan iklim atau krisis sosial-ekonomi). Diversifikasi varietas padi, misalnya, berfungsi sebagai mekanisme “biological hedging” yang memperkuat kapasitas adaptif terhadap perubahan iklim dan hama. Dalam konteks pertahanan negara, ketahanan pangan komunitas adat dapat dilihat sebagai dimensi pertahanan non-militer (non-traditional security), yang menjadi komponen penting dalam menjaga ketahanan nasional dan pertahanan nirmiliter.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus Kualitatif (Qualitative Case Study) yang bersifat mendalam (in-depth). Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah mendalami konteks spesifik Kesepuhan Sinarresmi sebagai komunitas adat, menggali praktik, nilai lokal, dan strategi yang diterapkan masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis keterkaitan langsung antara ketahanan pangan berbasis komunitas dengan upaya pertahanan negara, sebuah perspektif yang sering terabaikan dalam studi kuantitatif. Teknik Pengumpulan Data meliputi:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Dilakukan kepada informan kunci, terutama kepala adat (pupuh adat atau Abah), dan tokoh masyarakat yang berperan dalam pengelolaan pangan.
2. Observasi Partisipatif (*Participatory Observation*): Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan harian dan ritual agraris komunitas untuk memahami praktik dan nilai secara kontekstual.

3. Studi Literatur Terkini: Digunakan untuk memperkuat temuan lapangan dan menganalisis hasil wawancara dalam kerangka teori yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Peran Komunitas dalam Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan di Kasepuhan Sinarresmi merupakan hasil integrasi institusi adat dan praktik agraris yang secara langsung menopang empat pilar FAO yaitu availability, access, utilization, stability. Pilar availability dijaga melalui keberagaman varietas padi. Data lapangan menunjukkan bahwa warga Sinarresmi masih memelihara sekitar 68 varietas padi lokal, dengan 12 yang telah tersertifikasi (Jawa Pos, 2024). Setiap keluarga biasanya menanam tiga hingga empat varietas sekaligus. Diversifikasi ini berfungsi sebagai “portofolio biologis” yang menurunkan risiko gagal panen, sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga meskipun terjadi serangan hama atau perubahan iklim. Keberagaman varietas ini tidak hanya teknis, tetapi juga memperkaya organoleptik, karena beras yang dihasilkan tidak hanya putih, melainkan juga merah, hitam, bahkan ungu, sehingga konsumsi rumah tangga lebih beragam (Jawa Pos, 2024).

Availability ini diperkuat oleh institusi leuit, baik di tingkat keluarga maupun komunal (Leuit Si Jimat). Padi selalu disimpan dalam bentuk gabah untuk memperpanjang umur simpan. Menurut catatan lapangan, padi dalam leuit “tetap layak dikonsumsi meski telah disimpan belasan hingga puluhan tahun” (Jawa Pos, 2024). Sistem penyimpanan ini memungkinkan stabilitas (stability) cadangan pangan antarmusim, bahkan antar generasi. Dengan demikian, availability dan stability bukan sekadar hasil panen, melainkan buah dari sistem penyimpanan adat yang disiplin.



Gambar 1. Gabah (padi yang telah dipanen dan dikeringkan).

Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis



Gambar 2. Proses Upacara Seren Taun.

Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis



Gambar 3. Proses Penyimpanan Gabah pada Leuit oleh Abah (tetua kesepuhan).

Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis



Gambar 4. Leuit Sijimat (Kiri), dan Leuit Sinih.

Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis

*Leuit merujuk pada lumbung padi atau tempat penyimpanan gabah yang telah dijemur yang berasal dari Bahasa Sunda (Suandi, 2025)

Pada pilar access, distribusi pangan tidak ditentukan pasar, melainkan diatur secara normatif oleh kepemimpinan adat. Mawaddahni (2024, p. 135) mencatat bahwa pupuhu adat atau Abah merupakan otoritas tertinggi, dan seluruh keputusan mengenai pertanian padi berada di bawah pengawasannya. Bahkan, benih padi lokal (pare asal) “hanya boleh ditanam jika mendapat restu dari Abah Asep selaku pupuhu adat” (Mawaddahni, 2024, p. 136). Aturan ini berfungsi sebagai mekanisme kurasi sosial, memastikan varietas tetap sesuai lahan, sekaligus mengatur akses agar tidak ada penyalahgunaan untuk tujuan komersial berlebihan. Artinya, access dipahami sebagai hak sosial yang dilembagakan, bukan hanya soal daya beli.

Dimensi utilization pun bergerak di ranah budaya. Krisnawati (2024) menekankan bahwa manajemen padi di Sinarresmi “*symbolized in cultural practices of farming*” (p. 7). Ritual Seren Taun, misalnya, tidak hanya sebagai syukur panen, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk mengembalikan sebagian gabah ke leuit. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi dan penyimpanan tidak netral, melainkan diarahkan oleh makna sakral padi, sehingga pemanfaatannya lebih disiplin dan teratur.

Pupuhu adat, atau Abah mengatakan Selain Seren Taun, masyarakat Sinarresmi juga memiliki 29 ritual adat sepanjang tahun yang puncaknya bermuara pada Serentaun. Setelah

Serentaun, terdapat ritual turun nyambut yang menandai dibukanya kembali musim tanam padi. Hal ini memperlihatkan bahwa praktik pangan tidak hanya bersifat teknis, tetapi dilembagakan secara spiritual dan sosial, sehingga keempat pilar ketahanan pangan FAO (availability, access, utilization, stability) tertopang oleh siklus ritus kolektif.



Gambar 5. Abah Asep menjelaskan peoses dan strategi ketahanan pangan Kesepuhan Sinarresmi.

Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis



Gambar 6. Abah Asep merupakan tetua adat keturunan ke 10 (sepuluh).

Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis



Gambar 7. Kedatangan Universitas Pertahanan yang dipimpin oleh Kepala Program Studi Manajemen Pertahanan.

Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis

Secara konseptual, praktik ini dapat dibaca melalui teori commons dari Ostrom (1990) yang menekankan pentingnya aturan bersama, pengawasan sosial, dan sanksi untuk menjaga sumber daya. Prinsip-prinsip ini terlihat jelas di Sinarresmi, di mana aturan adat menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan kepatuhan. Selain itu, pendekatan food sovereignty (Nyéléni Forum, 2007) juga relevan, karena komunitas memiliki hak untuk mendefinisikan sistem pangan sendiri, sesuai budaya dan nilai lokal.

Dengan demikian, keempat pilar ketahanan pangan FAO di Sinarresmi bukanlah hasil individu, melainkan sepenuhnya dibentuk dan dipelihara oleh mekanisme sosial, spiritual, dan institusional komunitas adat. Sehingga, praktik komunitas ini memiliki legitimasi formal. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengakui “Cadangan Pangan Masyarakat” sebagai bagian dari cadangan nasional, dan negara wajib memfasilitasi sesuai kearifan lokal (Republik Indonesia, 2012). Dengan demikian, leuit dan aturan adat Sinarresmi bukan hanya entitas budaya, melainkan juga bagian dari sistem ketahanan pangan nasional

Ketahanan pangan di Kasepuhan Sinarresmi terintegrasi secara organik dalam praktik komunitas adat, menopang empat pilar FAO secara sistematis.

1. Ketersediaan (Availability): Dijaga melalui praktik diversifikasi varietas padi lokal dan institusi leuit. Warga Sinarresmi memelihara sekitar 68 varietas padi lokal, 12 di antaranya telah tersertifikasi. Leuit (lumbung padi) komunal dan keluarga berfungsi sebagai cadangan strategis, menyimpan gabah yang layak dikonsumsi hingga puluhan tahun.
2. Akses (Access): Distribusi dan akses pangan diatur secara normatif oleh kepemimpinan adat (Pupuh Adat/Abah). Aturan adat memastikan bahwa benih padi lokal (pare asal)

hanya boleh ditanam atas restu Abah, berfungsi sebagai mekanisme kurasi sosial untuk menjamin akses sebagai hak sosial, bukan sekadar daya beli.

3. Pemanfaatan (Utilization): Pemanfaatan pangan diarahkan oleh makna kultural dan ritual. Ritual Seren Taun adalah mekanisme sosial untuk mengembalikan sebagian gabah ke leuit. Padi di Sinarresmi dimaknai secara sakral (indung) sehingga pemanfaatannya lebih disiplin dan teratur.
4. Stabilitas (Stability): Dijamin oleh sistem penyimpanan leuit yang memungkinkan cadangan pangan antarmusim dan antargenerasi. Stabilitas ini diperkuat oleh aturan adat yang konsisten.

Secara teoretis, praktik ini mengafirmasi teori commons (Ostrom) dan konsep food sovereignty, di mana sumber daya diatur oleh aturan bersama yang dilembagakan secara spiritual dan sosial.

Diversifikasi Pangan Berbasis Lokal

Diversifikasi pangan di Kasepuhan Sinarresmi ditopang oleh padi lokal sebagai komoditas dominan yang dilestarikan secara turun-temurun. Menurut laporan lapangan, masyarakat Sinarresmi memelihara sekitar 68 varietas padi lokal, dengan 12 varietas telah tersertifikasi (Jawa Pos, 2024, para. 2). Data ini tidak hanya menunjukkan kekayaan plasma nutfah, tetapi juga menggambarkan bagaimana diversifikasi varietas menjadi strategi inti untuk memastikan ketersediaan (availability) dan stabilitas (stability) pangan. Lebih jauh, praktik rumah tangga biasanya menanam tiga hingga empat varietas sekaligus, sehingga risiko gagal panen karena hama, penyakit, atau perubahan iklim dapat diminimalisasi (Jawa Pos, 2024, para. 5).

Keanekaragaman varietas ini juga telah diakui oleh pemerintah daerah. ANTARA (2017, para. 3) mencatat bahwa terdapat 15 varietas padi lokal Kasepuhan Sinarresmi yang telah didaftarkan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi. Varietas tersebut antara lain Dete, Cere Marilen, Sri Kuning, Raja Denok, Ketan Hideung, Terong Beureum, Panca Warna, dan Nemol Sirnaresmi. Formalisasi ini memiliki implikasi penting: varietas yang diakui dapat memperoleh perlindungan hukum, akses penelitian, dan peluang pengembangan produk berbasis indikasi geografis.

Dari sisi praktik agraris, masyarakat Sinarresmi masih memegang teguh prinsip tidak menanam padi lebih dari satu kali dalam setahun dan tidak menggunakan pupuk kimia. Mawaddahni (2024, p. 145) menegaskan bahwa orientasi ini didasarkan pada prinsip menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan ekologi, bukan sekadar mengejar intensifikasi. Konsekuensinya, produktivitas tidak diukur hanya dari tonase per hektar, tetapi dari lama

kecukupan pangan melalui stok leuit. Dengan cara ini, diversifikasi varietas dan siklus tanam tahunan saling menguatkan: panen mungkin hanya sekali setahun, tetapi stok leuit yang beragam varietas menjamin ketahanan sepanjang tahun.

Disisi lain, Prinsip ini diperkuat oleh aturan adat bahwa padi hanya boleh ditanam sekali setahun dengan patokan bintang kerti dan bintang kidang. Pola ini sekaligus berfungsi menjaga keseimbangan ekologi dan menghubungkan kegiatan pertanian dengan kosmologi adat, yakni bumi sebagai indung dan langit sebagai bapak. Dengan demikian, diversifikasi pangan tidak hanya lahir dari strategi agronomis, tetapi juga dari kosmologi budaya yang memandu ritme tanam-panen.

Diversifikasi varietas juga berpengaruh pada pola konsumsi (utilization). Beras lokal yang dihasilkan tidak homogen; selain beras putih, ada pula beras merah, kuning, hitam, dan ungu. Laporan Jawa Pos (2024, para. 6) mencatat bahwa perbedaan warna beras ini memengaruhi preferensi konsumsi, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun ritual adat. Misalnya, beras ketan hitam atau merah sering dipakai untuk acara budaya dan upacara, sementara beras putih dikonsumsi sehari-hari. Keragaman konsumsi ini memperkuat ketahanan gizi dan menegaskan bahwa pangan lokal bukan sekadar komoditas, tetapi juga identitas budaya.



Gambar 8. Proses Penumbukan Padi.

Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis



Gambar 9. Peragaan Penumbukan padi yang ditumbuk berulang.

Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis



Gambar 10. Beras hasil penumbukan pertama.

Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis



Gambar 11. Beras ditampi untuk memisahkan kulit ari yang tersisa setelah ditumbuk.

Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis

Secara kelembagaan, otoritas adat juga mengatur pola tanam agar varietas bernilai budaya tidak hilang. Restu pupuh adat menjadi mekanisme sosial untuk memastikan varietas sakral, seperti padi ketan untuk ritual, tetap ditanam dan tersedia pada waktunya (Mawaddahni, 2024, p. 136). Dengan demikian, diversifikasi bukan hanya fenomena agronomis, melainkan juga produk dari tata kelola sosial.

Dengan kerangka ini, diversifikasi pangan berbasis lokal di Sinarresmi dapat dipahami sebagai strategi adaptif yang menghubungkan availability (ketersediaan varietas), stability (stok tahan lama di leuit), dan utilization (pola konsumsi beragam dan bermakna). Diversifikasi bukan sekadar jumlah varietas, melainkan sebuah desain sosial-ekologis yang lahir dari kearifan lokal dan diperkuat oleh kelembagaan adat. Diversifikasi pangan di Sinarresmi merupakan strategi adaptif sosial-ekologis.

1. Data Spesifik dan Strategi Varietas: Diversifikasi didukung oleh kekayaan 68 varietas padi lokal. Rumah tangga biasanya menanam tiga hingga empat varietas sekaligus untuk meminimalkan risiko gagal panen akibat hama atau iklim (biological hedging). Varietas yang telah terdaftar, seperti Dete, Cere Marilen, dan Raja Denok, menunjukkan adanya formalisasi perlindungan plasma nutfah.
2. Kaitannya dengan Pola Konsumsi: Diversifikasi ini memperkaya pola konsumsi (utilization) komunitas. Beras yang dihasilkan tidak homogen, mencakup beras putih, merah, kuning, hitam, dan ungu. Keragaman ini memenuhi kebutuhan gizi dan menegaskan identitas budaya; beras khusus seperti ketan hitam digunakan secara spesifik untuk ritual adat, sementara beras putih untuk konsumsi harian.
3. Prinsip Agraris: Masyarakat memegang teguh prinsip tidak menanam padi lebih dari satu kali dalam setahun dan menolak pupuk kimia. Orientasi ini didasarkan pada prinsip keberlanjutan ekologi dan kesuburan tanah, bukan sekadar intensifikasi hasil.

Dengan demikian, diversifikasi di Sinarresmi adalah desain sosial-ekologis yang lahir dari kearifan lokal, bukan sekadar jumlah varietas.

Penguatan Kelembagaan Lokal

Ketahanan pangan di Kasepuhan Sinarresmi tidak bisa dilepaskan dari kelembagaan adat yang berfungsi sebagai pengatur utama produksi, penyimpanan, dan distribusi pangan. Dalam konteks ini, kepemimpinan adat dipersonifikasikan melalui pupuh adat atau Abah yang memiliki legitimasi moral dan sosial. Mawaddahni (2024) menegaskan bahwa “pupuh adat merupakan otoritas tertinggi, dan seluruh kontrol sosial terkait dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk dalam bidang pertanian padi, dilakukan oleh Abah Asep.” Kutipan ini menunjukkan bahwa stabilitas distribusi pangan tidak semata dihasilkan dari mekanisme teknis

pertanian, tetapi dari otoritas adat yang mengikat kepatuhan kolektif.

Kelembagaan adat di Sinarresmi juga berperan dalam mengatur benih, pola tanam, dan distribusi hasil panen. Mawaddahni (2024) mencatat bahwa benih padi lokal (pare asal) hanya boleh ditanam jika mendapat restu dari Abah. Aturan ini berfungsi sebagai sistem kurasi sosial yang memastikan kualitas benih tetap sesuai lahan dan nilai budaya. Selain itu, mekanisme ini mengendalikan distribusi sehingga varietas bernilai budaya, seperti padi ketan yang dipakai dalam ritual, tetap ditanam dan tersedia pada waktunya. Dengan demikian, kelembagaan adat tidak hanya menjaga keberlangsungan varietas, tetapi juga menjamin stabilitas distribusi pangan dalam konteks sosial dan kultural.

Struktur kelembagaan adat di Sinarresmi tidak hanya mencakup Abah sebagai otoritas tertinggi, tetapi juga 17 pekerja adat turun-temurun seperti tukang kemit, canoli, panguluk, kolot lembur, pamakayaan, hingga pengkong laki/perempuan. Pembagian peran ini menegaskan bahwa kelembagaan adat bekerja secara kolektif dan fungsional dalam menjaga siklus pangan, mulai dari produksi, pengelolaan, hingga distribusi.



Gambar 12. Struktur Kelembagaan Kesepuhan Sinarresmi.

Sumber : Dokumentasi Pribadi Penulis

Lebih jauh, kelembagaan adat mengatur setoran hasil panen ke leuit komunal. Krisnawati (2024) menyatakan bahwa manajemen padi di Sinarresmi “symbolized in cultural practices of farming.” Hal ini berarti bahwa setoran ke Leuit Si Jimat tidak hanya berfungsi teknis sebagai penyimpanan, tetapi juga sebagai simbol ketaatan budaya yang mengikat seluruh masyarakat. Mekanisme ini menjadikan distribusi pangan sebuah kewajiban moral, bukan sekadar pilihan ekonomi. Pada saat paceklik atau krisis, stok di leuit komunal dapat dimobilisasi dengan restu kepemimpinan adat, sehingga stabilitas distribusi pangan tetap terjaga.

Kelembagaan adat juga berfungsi sebagai alat pengendali pasar internal. Norma adat melarang penjualan padi secara sembarangan, sehingga distribusi pangan diprioritaskan untuk konsumsi keluarga dan komunitas. Dengan mekanisme ini, fluktuasi harga di pasar luar tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan pangan internal. Hal ini memperlihatkan bahwa distribusi pangan di Sinarresmi tidak semata tunduk pada hukum pasar, melainkan dikendalikan oleh otoritas adat yang menempatkan ketahanan pangan komunitas sebagai prioritas utama.

Secara hukum, mekanisme kelembagaan adat di Sinarresmi memiliki legitimasi tambahan. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengakui “Cadangan Pangan Masyarakat” sebagai bagian dari sistem ketahanan pangan nasional, dan negara wajib memfasilitasi pengembangannya sesuai kearifan lokal (Republik Indonesia, 2012). Dengan demikian, keberadaan leuit dan tata kelola adat Sinarresmi bukan hanya entitas budaya, tetapi juga bagian dari sistem resmi cadangan pangan nasional.

Dengan kerangka ini, kelembagaan lokal Sinarresmi dapat dipahami sebagai governance node yang menghubungkan produksi, penyimpanan, dan distribusi. Ia mengurangi biaya transaksi melalui sanksi sosial, meningkatkan kepatuhan dengan legitimasi budaya, serta menstabilkan distribusi pangan melalui mekanisme komunal. Inilah yang menjadikan ketahanan pangan Sinarresmi bukan hanya persoalan agronomis, tetapi juga hasil dari kekuatan kelembagaan sosial-budaya.

Kelembagaan adat di Sinarresmi berfungsi sebagai pengatur utama produksi, penyimpanan, dan stabilitas distribusi pangan.

1. Otoritas dan Kontrol Sosial: Kepemimpinan adat (Abah) memiliki otoritas tertinggi dalam segala keputusan pertanian. Otoritas ini mengikat kepatuhan kolektif dan merupakan sumber legitimasi moral dan sosial.
2. Hubungan dengan Stabilitas Distribusi dan Pasar: Kelembagaan adat berfungsi sebagai alat pengendali pasar internal. Norma adat melarang penjualan padi secara sembarangan, memprioritaskan distribusi untuk konsumsi keluarga dan komunitas. Mekanisme ini memastikan stabilitas distribusi pangan internal dengan memutus dampak fluktuasi harga di pasar luar.
3. Legitimasi Hukum: Kelembagaan adat di Sinarresmi memiliki legitimasi formal karena Cadangan Pangan Masyarakat (diwakili oleh leuit) diakui sebagai bagian dari sistem ketahanan pangan nasional berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012.

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) di Kasepuhan Sinarresmi selalu dinegosiasikan dengan nilai adat, ekologi, dan kebutuhan produktivitas. Secara umum, TTG dipahami sebagai inovasi sederhana yang meningkatkan efisiensi dan hasil pertanian tanpa merusak ekosistem. Sebagai studi pembanding, penerapan TTG pada padi sawah di Bantul, Yogyakarta, menunjukkan hasil nyata. Utami, Priyatmojo, dan Subejo (2016) melaporkan bahwa “hasil ubinan demplot sebesar 6,8 ton/ha pada 2013 meningkat menjadi 7,8–9,8 ton/ha pada 2014 setelah penerapan teknologi tepat guna.” Data ini memperlihatkan bahwa TTG yang disesuaikan dengan kondisi lokal—misalnya melalui sistem tanam jajar legowo, pemupukan organik, dan penggunaan benih sehat—dapat meningkatkan produktivitas signifikan.

Namun, sekadar akses terhadap teknologi tidak cukup. Utami et al. (2016) menegaskan bahwa “tidak semua petani mau dan berani melaksanakan semua teknologi yang dianjurkan.” Pernyataan ini menunjukkan adanya gap antara akses fisik terhadap teknologi (misalnya tersedianya benih unggul, pupuk organik, atau alat tanam) dengan kapasitas mengoperasikan teknologi (pengetahuan teknis, keterampilan, dan keberanian untuk mengubah tradisi). Dalam konteks Sinarresmi, kapasitas ini sangat dipengaruhi oleh filter nilai adat: adopsi teknologi hanya dilakukan bila sejalan dengan prinsip menjaga kesuburan tanah, kelestarian air, dan penghormatan pada padi sebagai entitas sakral.

Sutisna (2021) mencatat bahwa masyarakat Sinarresmi memiliki “kemampuan adaptasi penggunaan teknologi terkait pelestarian lingkungan dan manfaat bagi kehidupan.” Artinya, komunitas bersedia menerima TTG selama teknologi itu memperkuat keberlanjutan ekologis dan kehidupan sosial. Contohnya, penggunaan pupuk kimia secara masif ditolak karena dianggap merusak tanah, tetapi pemanfaatan pupuk organik lokal, teknik pengeringan gabah yang lebih efisien, atau sistem irigasi sederhana yang hemat air dapat diterima. Hal ini memperlihatkan bahwa kapasitas mengoperasikan teknologi di Sinarresmi tidak hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga terkait legitimasi kultural dan ekologis.

Implikasi dari pemanfaatan TTG terhadap ketahanan pangan juga signifikan. TTG yang berhasil diadopsi dapat meningkatkan availability (peningkatan hasil panen) dan stability (stok yang lebih tahan dari risiko hama dan cuaca ekstrem). Sebaliknya, TTG yang dipaksakan tanpa memperhatikan kapasitas sosial-budaya justru menimbulkan resistensi, melemahkan kohesi komunitas, dan mengganggu distribusi pangan. Oleh karena itu, strategi penerapan TTG di Sinarresmi sebaiknya berbasis pada pendampingan partisipatif, pemanfaatan input lokal, dan sinkronisasi dengan kalender adat. Indikator keberhasilan tidak hanya diukur dari tonase per hektar, tetapi juga dari lama kecukupan stok leuit dan penerimaan sosial terhadap inovasi

tersebut.

Dengan demikian, perbedaan antara akses dan kapasitas menjadi sangat jelas: akses berarti tersedianya teknologi, sedangkan kapasitas berarti kemampuan komunitas untuk mengintegrasikannya ke dalam sistem sosial-ekologis mereka. Kasepuhan Sinarresmi membuktikan bahwa keberhasilan TTG bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan kompatibilitas dengan adat dan penerimaan kolektif, yang pada akhirnya memperkuat sistem ketahanan pangan berbasis komunitas.

Dalam praktik sehari-hari, masyarakat juga menegakkan norma ekologis yang ketat, misalnya larangan membunuh hama padi secara langsung. Alih-alih memutus rantai hama dengan kekerasan, mereka menjaga keseimbangan rantai makanan. Prinsip ini memperlihatkan bahwa teknologi maupun inovasi hanya dapat diadopsi jika selaras dengan etika ekologi dan siklus adat yang berlaku

Pemanfaatan TTG di Sinarresmi sangat selektif dan disaring oleh filter nilai adat untuk menjaga keberlanjutan ekologis.

1. Adopsi TTG yang Sesuai Adat: Komunitas bersedia menerima teknologi baru, namun hanya yang sejalan dengan prinsip menjaga kesuburan tanah, kelestarian air, dan penghormatan pada padi sebagai entitas sakral. Masyarakat memiliki kapasitas adaptasi terhadap TTG yang relevan dengan pelestarian lingkungan.
2. Penekanan pada Utilization dan Resiliensi: Penolakan terhadap pupuk kimia masif dan norma larangan membunuh hama padi secara langsung menunjukkan bahwa TTG yang diadopsi fokus pada pemanfaatan berkelanjutan (utilization) dan penguatan resiliensi ekologis, bukan sekadar peningkatan ketersediaan hasil panen (availability). Adopsi TTG sebaiknya difokuskan pada teknologi yang kompatibel dengan prinsip adat, seperti pupuk organik lokal, irigasi hemat air, dan teknik pengeringan gabah sederhana.

Diskusi Teoritis

Temuan lapangan di Kasepuhan Sinarresmi memperlihatkan bahwa ketahanan pangan komunitas adat tidak hanya bertumpu pada aspek teknis pertanian, tetapi juga pada institusi sosial-budaya yang mengatur bagaimana pangan diproduksi, disimpan, didistribusikan, dan dimaknai. Untuk itu, diskusi teoretis ini menempatkan hasil analisis dalam dialog dengan beberapa kerangka konseptual: commons theory, food sovereignty, resilience framework, serta konsep non-traditional security dalam pertahanan negara.

Ketahanan Pangan sebagai Commons (Ostrom)

Institusi leuit di Sinarresmi dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari common pool resources (CPRs). Ostrom (1990) dalam Governing the Commons menguraikan delapan

prinsip keberhasilan pengelolaan CPRs, antara lain aturan yang jelas, mekanisme monitoring, sanksi bertahap, serta keberadaan otoritas lokal yang legitimate. Temuan di Sinarresmi menunjukkan bahwa seluruh prinsip tersebut hadir dalam praktik adat. Aturan mengenai benih padi yang hanya bisa ditanam dengan restu Abah (Mawaddahni, 2024) merupakan bentuk clear boundaries dan collective choice arrangements. Monitoring sosial dilakukan melalui pengawasan adat, sementara larangan menjual padi sembarangan berfungsi sebagai sanksi yang mencegah leakage. Dengan demikian, Sinarresmi tidak hanya sekadar melestarikan tradisi, tetapi juga mengilustrasikan teori commons Ostrom dalam praktik.

Food Sovereignty: Hak atas Sistem Pangan Sendiri

Gerakan food sovereignty yang dideklarasikan di Forum Nyéléni (2007) menegaskan hak komunitas untuk mendefinisikan sistem pangannya sendiri sesuai dengan budaya dan kondisi lokal. Temuan di Sinarresmi selaras dengan prinsip ini. Diversifikasi varietas padi (68 varietas, 12–15 di antaranya terdaftar resmi) (Jawa Pos, 2024; ANTARA, 2017) menunjukkan bahwa komunitas secara aktif mempertahankan kedaulatan benih, bukan sekadar mengikuti logika homogenisasi pasar. Ritual Seren Taun, yang mengembalikan gabah ke leuit, juga memperlihatkan bagaimana pangan tidak direduksi menjadi komoditas, melainkan dimaknai sebagai entitas budaya dan spiritual (Krisnawati, 2024). Dengan demikian, Sinarresmi memperluas wacana food sovereignty dengan menegaskan bahwa hak komunitas atas pangan tidak hanya menyangkut akses terhadap lahan dan benih, tetapi juga hak untuk menjaga makna kultural dan spiritual pangan.

Resilience Framework: Adaptasi terhadap Perubahan

Kerangka resilience menekankan pentingnya kapasitas adaptif komunitas dalam menghadapi gangguan lingkungan dan sosial. Diversifikasi varietas padi berfungsi sebagai mekanisme “biological hedging” yang memperkuat kapasitas adaptif terhadap perubahan iklim. Selain itu, adopsi teknologi tepat guna hanya dilakukan jika sesuai dengan nilai adat dan menjaga ekologi. Sutisna (2021) mencatat bahwa masyarakat Sinarresmi memiliki “kemampuan adaptasi penggunaan teknologi terkait pelestarian lingkungan dan manfaat bagi kehidupan”. Hal ini menegaskan bahwa ketahanan pangan komunitas tidak hanya bergantung pada peningkatan hasil panen, tetapi juga pada kemampuan untuk menyaring inovasi agar tetap kompatibel dengan sistem nilai dan ekologi. Dengan demikian, resiliensi Sinarresmi tidak sekadar soal output produksi, melainkan kapasitas untuk bertahan sekaligus bertransformasi sesuai tantangan zaman.

Pangan sebagai Pertahanan Non-Militer

Ketahanan pangan di Sinarresmi juga dapat dilihat dari perspektif pertahanan negara. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2025, p. 2) menekankan bahwa “ketahanan pangan sangat penting dalam strategi pertahanan nasional karena menyediakan stabilitas yang mendukung keamanan dan kesejahteraan masyarakat.” UU No. 18 Tahun 2012 pun mengakui Cadangan Pangan Masyarakat sebagai bagian dari cadangan pangan nasional (Republik Indonesia, 2012). Dengan demikian, leuit dan stok komunal Sinarresmi bukan hanya berfungsi sebagai cadangan komunitas, tetapi juga dapat diposisikan sebagai buffer nasional dalam menghadapi krisis pangan. Hal ini sejalan dengan konsep pertahanan semesta di Indonesia, di mana semua komponen bangsa, termasuk komunitas adat, berperan dalam menopang ketahanan nasional. Berdasarkan dengan teori-teori di atas, Sinarresmi menunjukkan bahwa:

1. Commons theory merupakan prinsip tata kelola sumber daya bersama dapat berjalan efektif jika ditopang otoritas adat yang legitimate.
2. Food sovereignty merupakan hak komunitas atas sistem pangan sendiri diperlakukan tidak hanya melalui kontrol benih dan produksi, tetapi juga melalui pemaknaan kultural pangan.
3. Resilience framework dapat diartikan bahwa ketahanan pangan dicapai melalui diversifikasi varietas dan adaptasi selektif terhadap teknologi, sehingga komunitas mampu bertahan dalam jangka panjang.
4. Pertahanan semesta adalah praktik ketahanan pangan komunitas berkontribusi langsung pada pertahanan non-militer dengan menjaga stabilitas sosial dan mengurangi kerentanan wilayah.

Dengan demikian, diskusi teoretis ini menegaskan bahwa praktik ketahanan pangan berbasis komunitas di Sinarresmi tidak hanya relevan pada tingkat lokal, tetapi juga memiliki signifikansi pada level nasional dan global. Sinarresmi memperluas teori-teori yang ada dengan menunjukkan bahwa nilai adat, spiritualitas, dan simbolisme pangan dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Penelitian kualitatif mengenai strategi penguatan ketahanan pangan berbasis komunitas di Kasepuhan Sinarresmi memperlihatkan bahwa keberlanjutan sistem pangan tidak hanya ditopang oleh aspek agronomis, tetapi juga oleh institusi sosial-budaya yang melekat pada masyarakat adat. Empat dimensi ketahanan pangan menurut FAO—availability, access,

utilization, stability—terintegrasi secara organik dalam praktik komunitas:

1. Availability dijaga oleh diversifikasi ±68 varietas padi lokal, dengan sebagian telah tersertifikasi, serta praktik penyimpanan gabah di leuit yang memperpanjang umur stok.
2. Access diatur melalui otoritas adat (pupuhu/Abah) yang menetapkan aturan benih, pola tanam, dan distribusi hasil panen, sehingga akses pangan bersifat hak sosial berbasis norma, bukan sekadar kemampuan ekonomi.
3. Utilization diperkuat oleh nilai budaya, di mana padi dipandang sakral dan pemanfaatannya diarahkan melalui ritual agraris seperti Seren Taun, sehingga konsumsi pangan tidak hanya memenuhi gizi, tetapi juga memperkuat identitas dan solidaritas komunitas.
4. Stability dijaga melalui mekanisme setoran panen ke leuit komunal (Leuit Si Jimat) dan larangan menjual padi sembarangan, sehingga distribusi pangan bersifat disiplin, akuntabel, dan tahan guncangan pasar.

Pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) hanya diterima bila sejalan dengan prinsip adat dan keberlanjutan ekologi. Peningkatan produktivitas memang mungkin dicapai (misalnya naik dari 6,8 t/ha menjadi 7,8–9,8 t/ha dalam studi pembanding), tetapi keberhasilan adopsi sangat bergantung pada kapasitas mengoperasikan teknologi, bukan sekadar akses terhadapnya.

Sintesis dari temuan ini menunjukkan bahwa Kasepuhan Sinarresmi menghadirkan model ketahanan pangan berbasis komunitas yang berkontribusi langsung pada pertahanan non-militer. Stok pangan lokal yang tahan lama dan distribusi disiplin memperkecil risiko kerentanan sosial saat krisis, mendukung konsep pertahanan semesta, dan sejalan dengan kerangka hukum nasional (UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan).

Secara teoretis, temuan ini mengafirmasi prinsip commons theory (Ostrom) mengenai pengelolaan sumber daya bersama, memperluas konsep food sovereignty dengan penekanan pada makna kultural pangan, dan menunjukkan kapasitas adaptif sesuai kerangka resilience. Dengan demikian, Kasepuhan Sinarresmi bukan hanya entitas lokal, tetapi juga laboratorium sosial-ekologis yang relevan bagi diskursus global mengenai ketahanan pangan dan pertahanan negara.

Temuan ini juga menuntut diferensiasi peran aktor. Komunitas adat berfungsi menjaga keberlanjutan varietas lokal, mengelola leuit, serta memastikan ritus agraris tetap berjalan sebagai mekanisme sosial. Pemerintah daerah perlu memperkuat aspek legal melalui sertifikasi varietas, fasilitasi akses ke teknologi tepat guna yang ramah ekologi, serta dukungan kebijakan perlindungan lahan. Negara memiliki kewajiban mengintegrasikan cadangan pangan

masyarakat adat ke dalam sistem cadangan pangan nasional sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2012. Sementara itu, akademisi dan LSM dapat berperan dalam dokumentasi plasma nutfah, pengembangan produk berbasis indikasi geografis, serta transfer pengetahuan yang sesuai dengan konteks sosial-budaya komunitas.

Meski demikian, terdapat sejumlah keterbatasan yang harus diakui. Orientasi tanam sekali setahun dengan larangan pupuk kimia, meskipun ekologis, membatasi produktivitas dibandingkan sistem intensif modern. Selain itu, terdapat risiko erosi pengetahuan adat seiring berkurangnya minat generasi muda untuk bertani. Tekanan komersialisasi juga berpotensi mengganggu fungsi sosial leuit apabila varietas bernilai budaya berubah menjadi komoditas pasar. Kritik ini menunjukkan bahwa model Kasepuhan Sinarresmi bersifat adaptif namun rentan, sehingga penguatan kapasitas komunitas dan dukungan kebijakan menjadi krusial untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.

Abah Sinarresmi berpesan bahwa masyarakat tidak boleh melupakan jati diri, tradisi, dan adat budaya, karena tanpa itu peradaban tidak akan bertahan. Pesan ini memperlihatkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya persoalan material, melainkan juga persoalan identitas dan kelangsungan budaya sebagai fondasi peradaban.

Saran

Bagi Pemerintah Daerah dan Nasional

1. Perlu memberikan dukungan regulatif dan programatik terhadap penguatan leuit sebagai cadangan pangan masyarakat, sesuai amanat UU No. 18/2012.
2. Diversifikasi varietas padi lokal di Sinarresmi (± 68 varietas) perlu diperluas sertifikasinya agar mendapat perlindungan hukum dan akses ke program penelitian maupun pemasaran berbasis indikasi geografis.

Bagi Komunitas Adat

1. Kelembagaan adat perlu terus memperkuat mekanisme pengawasan sosial agar praktik larangan penjualan padi sembarangan tetap dipatuhi di tengah tekanan komodifikasi pasar.
2. Adopsi TTG sebaiknya difokuskan pada teknologi yang kompatibel dengan prinsip adat dan ekologi, seperti pupuk organik lokal, irigasi hemat air, dan teknik pengeringan gabah sederhana.

Bagi Akademisi dan Peneliti

1. Studi lanjutan perlu mengembangkan pendekatan participatory action research (PAR) untuk menggali inovasi berbasis komunitas dalam pengelolaan varietas padi dan TTG.
2. Penelitian perbandingan antar komunitas adat lain (misalnya Kasepuhan Ciptagelar atau

Kasepuhan Cisitu) dapat memperkaya pemahaman mengenai pola diversifikasi dan tata kelola pangan adat.

Bagi Sektor Pertahanan dan Keamanan

1. Kementerian Pertahanan dapat menjadikan model Sinarresmi sebagai praktik baik dalam memperkuat pertahanan non-militer berbasis ketahanan pangan komunitas.
2. Integrasi cadangan pangan komunitas ke dalam sistem logistik nasional perlu dipertimbangkan sebagai strategi pencegahan kerawanan pangan saat krisis.

Dengan demikian, penguatan ketahanan pangan di Kasepuhan Sinarresmi bukan hanya mendukung keberlanjutan lokal, tetapi juga berkontribusi pada resiliensi nasional. Model ini dapat menjadi inspirasi bagi kebijakan pangan dan pertahanan negara yang menekankan kemandirian, keberlanjutan, serta penghormatan pada kearifan lokal.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih kepada Kepala Program Studi Manajemen Pertahanan Bapak Kolonel Tek Dr. Ir. Hikmat Zakky Almubaroq, S.Pd., M.Si., CIQnR., CIQaR., MCF atas bimbingan dalam melakukan kegiatan ini serta selaku pembimbing pertama, dan kepada Bapak Pembimbing ke dua, Bapak Dr. Untung Hartono, M.D.A., terima kasih sedalam-dalamnya pada Pimpinan Kasepuhan Sinarresmi Abah Asep yang telah mengizinkan kami untuk melakukan kegiatan selama beberapa observasi dan wawancara, serta seluruh perangkat desa, Dandim, Danramil, Babinsa dan Babinkamtibnas Desa Sinar Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

DAFTAR REFERENSI

- ANTARA. (2017, 25 Juli). Kasepuhan Sinarresmi miliki 68 varietas padi lokal. ANTARA News Megapolitan. <https://megapolitan.antaranews.com/berita/31053/kasepuhan...>
- Astuti, R. D., Sujarwo, S., & Hidayat, K. (2016). PERAN KELEMBAGAAN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI PANGAN. Agricultural Socio-Economics Journal, 15(3), 136. <https://agrise.ub.ac.id/index.php/agrise/article/view/172> (Open Access)
- FAO. (2020). The State of Food Security and Nutrition in the World 2020. Rome: FAO.
- Hidayat, R., et al. (2018). "Diversifikasi Pangan Lokal untuk Mendukung Ketahanan Pangan di Pedesaan." Jurnal Pertanian Berkelanjutan, 6(2), 45-56.
- Isda D. N., Kuswindriati R. Y., Tasmat Djulianto, 2023. Penguatan Desa Berbasis Kampung Iklim: Terwujudnya Ketahanan Pangan di Desa Pematang Tinggi, Kabupaten Pelalawan. Jurnal Penelitian Multiidisiplin. <https://doi.org/10.55681/armada.v1i9.849> Vol. 1. No.9.

e-ISSN: 2964-2981
<https://doi.org/10.55681/armada.v1i9.849>

Jawa Pos. (2024, 20 Februari). Warga Kasepuhan Sinar Resmi punya 68 varietas padi lokal, baru 12 tersertifikasi. Jawa Pos. <https://www.jawapos.com/features/014197929/warga-kasepuhan-sinar-resmi-punya-68-varietas-padi-lokal-baru-12-tersertifikasi>

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2025, January 7). Mewujudkan kemampuan ketahanan pangan yang kuat untuk mendukung perekonomian nasional [Policy paper]. Ditjen Pothan. <https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2025/01/MEWUJUDKAN-KEMAMPUAN-KETAHANAN-PANGAN-YANG-KUAT-UNTUK-MENDUKUNG-PEREKONOMIAN-NASIONAL.pdf> Indonesia Defense Ministry

Krisnawati, E. (2024). The farming ritual and the rice metaphor: How people of Kasepuhan Sinarresmi worship rice. *Cogent Arts & Humanities*, 11(1), 2338329. <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2338329> <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2338329>

Krisnawati, H. (2024). Indigenous knowledge in food security: A case study of Kasepuhan Sinarresmi. *Jurnal Ketahanan Pangan Indonesia*, 11(1), 1-10.

Mawaddahni, S. (2024). Kasepuhan Sinar Resmi: Menjaga warisan budaya dari kaki Gunung Halimun. *MINTAKAT: Jurnal Arsitektur*, 25(1), 129-144. <https://doi.org/10.26905/jam.v25i1.13609> (PDF: <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jam/article/download/13609/pdf/47085>) Journals at Merdeka University+1 <https://doi.org/10.26905/jam.v25i1.13609>

Nyéléni Forum for Food Sovereignty. (2007, February 27). Declaration of Nyéléni. <https://nyeleni.org/IMG/pdf/DeclNyeleni-en.pdf>

Ostrom, E. (1990). Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge University Press. https://www.actu-environnement.com/media/pdf/ostrom_1990.pdf <https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>

Prasetyo, B., & Nugroho, T. (2017). "Penguatan Kelembagaan Lokal dalam Mendukung Ketahanan Pangan." *Jurnal Ekonomi Desa*, 4(1), 23-30.

Rahman, A., et al. (2020). "Peran Lumbung Pangan dalam Ketahanan Pangan Desa." *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 8(3), 112-120.

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Badan Pembinaan Hukum Nasional. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39100>

Rosidin, et al. (2025). Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Terhadap Perempuan Disekitar Hutan Datar Lebar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 9(2), 741-748. <https://doi.org/10.31604/jim.v9i2.2025.741-748> <https://doi.org/10.31604/jim.v9i2.2025.741-748>

Sari, D., et al. (2021). "Komunitas dan Ketahanan Pangan: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal*

Pangan dan Gizi, 10(1), 78-89.

Sari, et al. (2021). Partisipasi Komunitas dalam Sistem Pangan Lokal Berkelanjutan. Jurnal Pembangunan Pedesaan, 15(2), 55-68.

Setiawan, H. C. A., Prasetya, A., Ilham, I., Fatimah, N., & Latukismo, T. H. (2023). Building an entrepreneurship development model for millennial farmers human resources. SAJ (Social and Agricultural Journal), 3(2). <https://doi.org/10.15408/saj.v3i2.36022> <https://doi.org/10.15408/saj.v3i2.36022>

Sinaga, G. A. D., Kurniawan, Y., Aminy, N. A., & Kusumawati, A. (2022). URGENSI KOMUNITAS, BUDAYA LOKAL DAN KETAHANAN PANGAN DALAM GERAKAN URBAN FARMING DI MASA PANDEMI COVID-19. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 11(3), 337-352. [tautan mencurigakan telah dihapus] (Open Access CC BY-SA)

<https://doi.org/10.23887/jish.v11i2.45041>

Sjafrizal, T., & Pagi, D. (2023). Pemberdayaan petani manggis generasi milenial melalui pelatihan dan pendampingan digital komunikasi pemasaran di Desa Ponggang Serangpanjang Subang. Intelektiva, 4(10)

Suandi, M. (2025). Leuit: Sebagai Warisan Kearifan Lokal dan Penopang Ketahanan Pangan Masyarakat Baduy. Jurnal Sindoro Cendikia Pendidikan. ISSN 3025-6488. Prev DOI: 10.9644/sindoro.v3i9.252

Suryana, A. (2019). "Tantangan Ketahanan Pangan di Era Modernisasi." Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 7(2), 15-25.

Sutisna, M., Falahi, Y., Wiharja, J., & Sunaryanti, I. (2021). Kearifan lokal arsitektur tradisional Kasepuhan Sinar Resmi Cisolok Sukabumi. Jurnal Citizenship Virtues, 1(2), 124-136. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i2.1009> (PDF: <https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/citizenshipvirtues/article/download/1009/587>) <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i2.1009> jurnal.stkipkusumanegara.ac.id

Utami, S. N. H., Priyatmojo, A., & Subejo, S. (2016). Penerapan teknologi tepat guna padi sawah spesifik lokasi di Dusun Ponggok, Trimulyo, Jetis, Bantul. Indonesian Journal of Community Engagement, 1(2), 239-254. <https://doi.org/10.22146/jpkm.10610> <https://doi.org/10.22146/jpkm.10610>

Wijaya, T., et al. (2021). "Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk Meningkatkan Produksi Pangan di Desa." Jurnal Teknologi Pertanian, 9(4), 34-50.